JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : Https://Ejurnal.Stkip-Pessel.Ac.Id/Index.Php/Jmp
Email : Jmp@Stkip-Pessel.Ac.Id

P-ISSN : 2548-4826 ; E-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 10892-10902
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SELATAN DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA DI KELURAHAN RAWANG KOTA PADANG

Robbii Satria Nugraha[1], Mukti Diapepin[2], Mellati Mandasari[3]
[1,2,3] STIA LPPN Padang, Indonesia

Email: robbiisatrianugraha@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3620

Sections Info
Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 28 October 2026
Keywords:
Strategy
Flood Mitigation
District Government
Coordination
Community Participation

ABSTRACT

This study looks at how the Padang Selatan Subdistrict Government works to prevent floods in Rawang Village, Padang City. It also looks at the main problems in the process. This study uses a descriptive qualitative method. There were seven informants who were chosen by purposive sampling. The informants came from the subdistrict, Rawang Village, and local people who live in flood-risk areas. Data were gained from interviews, field checks, and documents. The data were then studied through data selection, data display, drawing results, and checking the results. The results show that flood prevention in Rawang Village has been carried out in several ways. These include flood education, community work, area cleaning, drain care, risk area checks, and work with related agencies. Local people also take part in these actions. Based on Quinn's strategy theory, the goals and plans are in line with the needs of flood prevention. The duties of each party are also clear. However, some problems remain. These include limited tools and facilities, weak early checks, less regular control and review, and uneven public participation. Drain and waste problems also happen often. The study shows that clear work plans, good teamwork, and regular control are needed to improve flood prevention at the local level..

ABSTRAK

Penelitian ini membahas cara Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam cegah banjir di Kelurahan Rawang, Kota Padang. Penelitian ini juga melihat apa saja kendala yang ada. Metode yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Ada tujuh orang yang jadi informan. Mereka dipilih secara purposive. Informan terdiri dari pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan warga yang ada di area rawan banjir. Data diambil lewat wawancara, cek lapang, dan dokumen. Data lalu diolah lewat tahap pilih data, sajikan data, tarik hasil, dan cek hasil. Hasil kajian tunjukkan bahwa upaya cegah banjir di Kelurahan Rawang sudah ada. Upaya itu berupa edukasi soal banjir, gotong royong, bersih area, rawat drainase, cek titik rawan, dan kerja sama dengan dinas. Warga juga ikut dalam aksi yang ada. Berdasar teori Quinn, arah dan cara kerja sudah cukup pas dengan tujuan. Tugas tiap pihak juga cukup jelas. Namun, masih ada kendala. Kendala itu ialah alat dan sarana yang masih kurang, cek awal yang belum kuat, kontrol dan nilai hasil yang belum rutin, serta peran warga yang belum sama. Masalah drainase dan sampah juga masih kerap ada. Hasil ini tunjukkan bahwa perlu ada kerja yang rapi, kerja sama yang baik, dan kontrol yang rutin agar cegah banjir dapat jalan lebih baik.

Kata kunci: *Strategi Pemerintah, Mitigasi Banjir, Pemerintah, Koordinasi, Partisipasi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sering menghadapi bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir. Dampak banjir tidak hanya berupa genangan pada permukiman dan jalan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, menghambat kegiatan ekonomi, dan menimbulkan masalah kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi banjir perlu dilakukan sebelum bencana terjadi melalui pengelolaan lingkungan, penyusunan kebijakan, koordinasi antarpihak, penyediaan informasi, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Kota Padang merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki risiko banjir. Kondisi pesisir, keberadaan aliran sungai, curah hujan yang tinggi pada waktu tertentu, serta perkembangan kawasan permukiman menjadi bagian dari kondisi yang memengaruhi risiko tersebut. Permasalahan banjir juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, seperti drainase yang kurang lancar, sedimentasi, perubahan penggunaan lahan, dan sampah yang menyumbat saluran. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko banjir tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan pengelolaan dan koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, instansi teknis, dan masyarakat.

Kelurahan Rawang di Kecamatan Padang Selatan termasuk wilayah yang mengalami persoalan banjir. Wilayah ini berada pada daerah yang relatif rendah dan berdekatan dengan kawasan pesisir serta aliran air. Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043 mencatat luas kawasan rawan banjir di Kelurahan Rawang sekitar 133,8 hektare. Pada saat hujan dengan intensitas tinggi, beberapa saluran drainase tidak selalu mampu menampung aliran air sehingga genangan masih dapat terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko banjir di Rawang membutuhkan strategi yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya tindakan ketika banjir telah terjadi.

Persoalan tersebut telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Ratonda dan Alhadi (2024) mengenai strategi mitigasi banjir oleh Pemerintah Kota Padang di Kecamatan Koto Tangah menemukan bahwa pelaksanaan mitigasi didukung oleh komitmen pemerintah, kerja sama antarinstansi, dukungan teknologi, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian Sari dan Erianjoni (2019) di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang, menunjukkan bahwa mitigasi banjir dilakukan melalui upaya fisik, seperti perbaikan drainase dan penyediaan jalur evakuasi, serta upaya sosial berupa pencarian informasi, kerja sama masyarakat, dan sosialisasi dari pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi banjir pada tingkat lokal membutuhkan keterpaduan antara tindakan fisik, kegiatan sosial, koordinasi pemerintah, dan keterlibatan masyarakat.

Penelitian mengenai mitigasi banjir di wilayah lain juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Penelitian Rafinzar dkk. (2025) di Kota Palembang menemukan hubungan yang kuat antara pelaksanaan kebijakan terkait drainase dan pengelolaan sampah dengan partisipasi masyarakat, serta menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengurangan risiko banjir. Sementara itu, penelitian mengenai mitigasi banjir di Wetee, Kabupaten Sidenreng Rappang,

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas pada beberapa tahapan, khususnya dalam perencanaan dan pengawasan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program mitigasi belum secara otomatis menjamin keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan pelaksanaannya.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas strategi mitigasi banjir di beberapa wilayah Kota Padang dan daerah lain, masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana strategi pemerintah pada tingkat kecamatan diterapkan secara lebih spesifik pada wilayah rawan banjir di Kelurahan Rawang. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas faktor pendukung dan penghambat, bentuk mitigasi masyarakat, atau implementasi kebijakan pada wilayah tertentu. Belum banyak pembahasan yang menguraikan keterkaitan antara tujuan, kebijakan, program, pembagian tanggung jawab, koordinasi, keterpaduan kegiatan, serta sistem pengendalian dalam pelaksanaan mitigasi banjir pada tingkat Kecamatan Padang Selatan. Celah tersebut penting dikaji karena Kecamatan Padang Selatan tidak memiliki seluruh kewenangan teknis dalam pembangunan dan perbaikan drainase, pengelolaan sampah, maupun pengendalian aliran air. Kecamatan memiliki posisi penting sebagai penghubung antara persoalan masyarakat dengan pemerintah kelurahan dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan Padang Selatan telah menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko banjir, seperti sosialisasi, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan lokasi rawan, komunikasi dengan pemerintah kelurahan, serta koordinasi dengan BPBD dan perangkat daerah lainnya. Namun, keberadaan kegiatan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari keterkaitan antara tujuan dan kebijakan, kesesuaian program, pembagian tanggung jawab, koordinasi antarpihak, serta pengendalian dan evaluasi. Permasalahan banjir dan lingkungan yang masih berulang menjadi indikasi bahwa pelaksanaan mitigasi perlu dilihat sebagai suatu rangkaian strategi yang saling berhubungan.

Penelitian ini menggunakan pemikiran Quinn (2003) yang memandang strategi sebagai pola yang menyatukan tujuan, kebijakan, dan tindakan organisasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis strategi mitigasi melalui kesesuaian tujuan dengan kebijakan, kesesuaian program dengan tujuan, pembagian tanggung jawab, koordinasi antarpihak, dan keterpaduan kegiatan. Selain itu, hambatan pelaksanaan dianalisis melalui sistem pengendalian, kemampuan mendeteksi masalah sejak awal, keberlanjutan evaluasi, dan munculnya kembali permasalahan yang sama. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya melihat kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam strategi mitigasi banjir.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Rawang Kota Padang dan apa saja hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Rawang Kota Padang serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara program, pembagian tugas, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pengendalian dalam pelaksanaan mitigasi banjir pada tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dengan lokasi

penelitian di Kelurahan Rawang, Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh gambaran mengenai strategi pemerintah dalam mitigasi banjir, termasuk proses pelaksanaan program, koordinasi antarpihak, pembagian kewenangan, keterlibatan masyarakat, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada strategi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan berdasarkan pemikiran Quinn (2003), serta hambatan yang berkaitan dengan pengendalian, deteksi masalah, evaluasi, dan munculnya kembali permasalahan banjir.

Partisipan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, tanggung jawab, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan mitigasi banjir di Kelurahan Rawang. Informan berjumlah tujuh orang yang terdiri atas aparatur Kecamatan Padang Selatan, aparatur Kelurahan Rawang, dan masyarakat Kelurahan Rawang. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, serta kendala mitigasi banjir. Informan tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi secara statistik, tetapi sebagai sumber informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Jabatan/Informan
1	Kasi Kesos Kecamatan Padang Selatan
2	Lurah Rawang
3	Kasi Trantib dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Padang Selatan
4	Kasi PM dan Kesos Kelurahan Rawang
5	Kasubag Umum Kecamatan Padang Selatan
6	Masyarakat Kelurahan Rawang
7	Masyarakat Kelurahan Rawang

Sumber: Data penelitian, 2026.

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

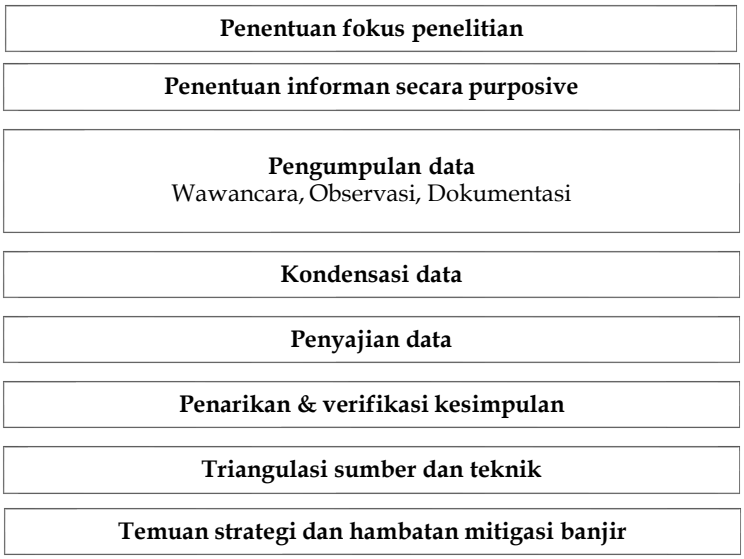
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dengan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan indikator strategi yang digunakan, meliputi tujuan dan kebijakan, program, pembagian tanggung jawab, koordinasi, keterpaduan kegiatan, serta aspek pengendalian dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mitigasi banjir, bentuk koordinasi, keterlibatan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi. Observasi dilakukan terhadap kondisi drainase, daerah aliran air, titik genangan, lingkungan permukiman, sarana pendukung mitigasi, kegiatan gotong royong, sosialisasi, dan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa kebijakan, program kerja, laporan kegiatan, data kejadian banjir, dan dokumentasi kondisi lapangan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menentukan fokus penelitian dan informan berdasarkan keterkaitan dengan pelaksanaan mitigasi banjir. Tahap kedua adalah mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ketiga adalah mengorganisasikan data berdasarkan tema dan indikator penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan

dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan strategi dan hambatan mitigasi banjir.

Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dirangkum, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang menghubungkan temuan berdasarkan indikator strategi dan hambatan pelaksanaan mitigasi. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses analisis untuk memastikan kesesuaian antara temuan dan data yang diperoleh. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparatur kecamatan, aparatur kelurahan, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Gambar 1. Alur Penelitian Strategi Mitigasi Banjir di Kelurahan Rawang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi banjir di Kelurahan Rawang telah dilaksanakan melalui kegiatan struktural dan nonstruktural. Pemerintah Kecamatan Padang Selatan menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan penghubung dengan instansi teknis, sedangkan Pemerintah Kelurahan Rawang berperan lebih dekat dengan pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Kegiatan yang ditemukan meliputi sosialisasi kebencanaan, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan wilayah rawan, komunikasi lapangan, koordinasi dengan BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menyampaikan informasi mengenai genangan atau saluran bermasalah.

Tabel 2. Hasil Penelitian Strategi Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Rawang

No.	Aspek	Temuan Utama	Hasil Analisis
1	Kesesuaian tujuan dengan	Tujuan diarahkan pada pengurangan risiko,	Tujuan dan kebijakan telah searah, tetapi pengawasan dan pembinaan

No.	Aspek	Temuan Utama	Hasil Analisis
	kebijakan	kesiapsiagaan, kondisi lingkungan, dan kemampuan masyarakat.	masih perlu diperkuat.
2	Kesesuaian program dengan tujuan	Sosialisasi, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan, dan koordinasi mendukung pengurangan risiko.	Program sesuai tujuan, namun pelaksanaan dipengaruhi sarana, anggaran, dan partisipasi masyarakat.
3	Tidak adanya tumpang tindih program	Pembagian peran kecamatan, kelurahan, BPBD, perangkat teknis, dan masyarakat relatif jelas.	Tumpang tindih bukan masalah utama; tantangan lebih banyak pada kecepatan koordinasi lintas kewenangan.
4	Koordinasi antarpihak	Koordinasi berlangsung melalui kelurahan, RT/RW, masyarakat, BPBD, dan perangkat daerah terkait.	Koordinasi menjadi unsur yang paling menonjol dalam menghubungkan masalah lapangan dengan tindak lanjut.
5	Keterpaduan strategi	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi saling berhubungan.	Strategi telah membentuk satu rangkaian, tetapi monitoring dan evaluasi perlu lebih rutin dan terdokumentasi.

Sumber: Hasil penelitian, diolah peneliti, 2026.

Kesesuaian Tujuan dengan Kebijakan Mitigasi

Tujuan mitigasi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan diarahkan untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kesiapan masyarakat, menjaga kondisi lingkungan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi banjir. Arah tersebut sejalan dengan kebijakan penanggulangan bencana yang menekankan pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Kesesuaian itu terlihat melalui sosialisasi, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan wilayah rawan, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Walaupun arah tujuan dan kebijakan telah sesuai, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya menghasilkan kondisi yang diharapkan. Masih ditemukan kebiasaan membuang sampah ke saluran air, partisipasi warga belum merata, dan kondisi geografis Rawang yang relatif rendah membuat genangan tetap mudah muncul ketika hujan tinggi. Berdasarkan Quinn (2003), hubungan tujuan dan kebijakan telah terbentuk, tetapi pengawasan, pembinaan, dan keterlibatan masyarakat tetap dibutuhkan agar tujuan mitigasi lebih nyata dalam kondisi lingkungan.

Kesesuaian Program dengan Tujuan Mitigasi

Program yang dilaksanakan telah mengarah pada pengurangan risiko banjir. Sosialisasi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, gotong royong dan pembersihan

drainase dilakukan untuk menjaga aliran air, sedangkan pemantauan wilayah rawan membantu mengenali kondisi yang berpotensi menimbulkan genangan. Koordinasi dengan instansi lain dilakukan ketika masalah membutuhkan penanganan teknis di luar kewenangan kecamatan.

Pelaksanaan program belum selalu berlangsung dengan intensitas yang sama. Tidak seluruh masyarakat mengikuti sosialisasi dan gotong royong, sementara keterbatasan anggaran dan sarana membuat beberapa kegiatan belum dapat dilakukan sesering yang dibutuhkan. Dengan demikian, program telah sesuai dengan tujuan mitigasi, tetapi keberlanjutan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat masih menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Tidak Adanya Tumpang Tindih Program Mitigasi

Pembagian pekerjaan dalam mitigasi banjir relatif jelas. Pemerintah kecamatan lebih banyak menjalankan koordinasi dan pembinaan, pemerintah kelurahan berhubungan langsung dengan masyarakat, BPBD berperan pada aspek kebencanaan dan kesiapsiagaan, sedangkan perangkat daerah teknis menangani persoalan infrastruktur sesuai kewenangannya. Masyarakat berperan menjaga lingkungan, mengikuti gotong royong, dan menyampaikan informasi mengenai saluran tersumbat atau genangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih program bukan masalah utama. Kendala lebih sering muncul ketika satu persoalan memerlukan tindak lanjut dari instansi yang berbeda sehingga proses penanganan membutuhkan waktu. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi lintas kewenangan agar pembagian tugas yang telah jelas dapat diikuti dengan tindak lanjut yang cepat dan tidak terputus.

Koordinasi antara Kecamatan, Kelurahan, dan Masyarakat

Koordinasi menjadi unsur yang menonjol dalam pelaksanaan mitigasi banjir di Kelurahan Rawang. Pemerintah kecamatan menghubungkan persoalan lapangan dengan instansi yang memiliki kewenangan lebih luas, pemerintah kelurahan menyampaikan informasi dan membantu pelaksanaan kegiatan, sedangkan masyarakat menjadi sumber informasi awal ketika muncul saluran tersumbat, genangan, atau kondisi lain yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Koordinasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui komunikasi langsung di lapangan, grup komunikasi, laporan RT/RW, sosialisasi, dan kegiatan gotong royong. Pola tersebut membantu informasi diterima lebih cepat ketika kondisi lingkungan berubah. Namun, komunikasi tetap perlu dilakukan secara rutin agar laporan yang masuk dapat segera diikuti dengan tindakan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Strategi Mitigasi Bencana Berjalan sebagai Satu Kesatuan

Pelaksanaan mitigasi menunjukkan hubungan antara perencanaan, kegiatan lapangan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Sosialisasi, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan daerah rawan, serta koordinasi dengan instansi terkait memiliki tujuan yang sama. Hasil pemantauan dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang membutuhkan pembersihan atau tindak lanjut, sedangkan evaluasi digunakan untuk mengenali masalah yang masih muncul setelah kegiatan dilakukan.

Jika dilihat melalui Quinn (2003), kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi telah mulai berjalan sebagai hubungan antara tujuan, kebijakan, dan tindakan. Temuan ini sejalan dengan Munjiah dkk. (2025) yang menekankan keberlanjutan pencegahan, kesiapsiagaan, dan

evaluasi, serta Karniati (2024) yang menunjukkan bahwa mitigasi membutuhkan beberapa kegiatan yang saling mendukung. Pada Kelurahan Rawang, pengurangan risiko tidak dapat bergantung pada satu program, tetapi memerlukan hubungan yang konsisten antara kegiatan, koordinasi, pemantauan, dan tindak lanjut.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Mitigasi Bencana Banjir Sistem Pengendalian Belum Optimal

Pengendalian telah dilakukan melalui monitoring lapangan, komunikasi dengan pemerintah kelurahan, laporan masyarakat, dan koordinasi dengan instansi terkait. Aparatur memantau gotong royong, pembersihan drainase, sosialisasi, serta kondisi titik rawan. Ketika ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, informasi diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Keterbatasannya terletak pada mekanisme pengendalian yang belum sepenuhnya terstruktur, rutin, dan terdokumentasi. Pengawasan cenderung meningkat ketika musim hujan atau setelah banjir terjadi, sedangkan luas wilayah dan keterbatasan personel membuat pemantauan menyeluruh sulit dilakukan. Ketergantungan pada laporan warga juga dapat membuat tindak lanjut terlambat apabila informasi tidak segera disampaikan.

Deteksi Dini terhadap Permasalahan Masih Terbatas

Pemerintah mengetahui masalah melalui pemantauan lapangan dan laporan dari kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, maupun warga. Informasi mengenai saluran tersumbat, penumpukan sampah, dan genangan menjadi dasar untuk melakukan pengecekan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Mekanisme ini membantu aparatur memperoleh gambaran kondisi yang tidak dapat dipantau setiap saat.

Sebagian informasi masih diterima setelah kondisi mulai mengganggu masyarakat atau ketika hujan berintensitas tinggi telah terjadi. Keterbatasan personel membuat seluruh titik tidak dapat diawasi terus-menerus, sehingga beberapa potensi masalah diketahui setelah gejalanya membesar. Deteksi dini karena itu masih sangat dipengaruhi oleh kecepatan masyarakat dalam melaporkan kondisi lingkungannya.

Evaluasi Belum Dilakukan secara Rutin dan Berkelanjutan

Evaluasi telah dilakukan terutama setelah kegiatan selesai atau setelah kejadian banjir. Pembahasan digunakan untuk melihat pelaksanaan program, kendala yang ditemukan, dan tindakan yang diperlukan pada tahap berikutnya. Pemerintah juga menerima masukan masyarakat mengenai kondisi lingkungan dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Namun, evaluasi belum memiliki jadwal yang konsisten dan terencana. Beban kerja aparatur, keterbatasan waktu, dan banyaknya pelayanan pemerintahan membuat pembahasan mitigasi sering menyesuaikan situasi. Beberapa rekomendasi juga memerlukan dukungan instansi lain atau sumber daya tambahan sehingga tindak lanjut belum selalu dapat dilakukan dengan cepat dan terdokumentasi sebagai siklus evaluasi yang berulang.

Permasalahan yang Sama Masih Berulang

Masalah yang berulang terutama berupa penyumbatan drainase akibat sampah dan sedimentasi, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta beberapa titik infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, gotong royong, imbauan, koordinasi dengan RT/RW, dan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan

Umum ketika terdapat kerusakan yang membutuhkan penanganan teknis.

Tindakan tersebut belum dapat menghilangkan seluruh penyebab. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu, karakter geografis Rawang tetap menimbulkan kerentanan ketika curah hujan tinggi, dan keterbatasan anggaran serta sarana membuat perbaikan drainase belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Masalah berulang dengan demikian muncul dari interaksi perilaku warga, kondisi fisik wilayah, kapasitas infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya pemerintah.

Pembahasan

1. Strategi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Rawang

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi mitigasi banjir telah dijalankan melalui hubungan antara tujuan, kebijakan, program, pembagian kewenangan, koordinasi, dan keterpaduan kegiatan. Tujuan pengurangan risiko diterjemahkan ke dalam sosialisasi, gotong royong, pembersihan drainase, pemantauan wilayah rawan, dan koordinasi dengan instansi teknis. Pembagian tugas antaraktor relatif jelas sehingga kecamatan dapat menjalankan fungsi koordinasi dan penghubung, kelurahan mendekatkan kegiatan kepada masyarakat, sedangkan instansi teknis menangani pekerjaan sesuai kewenangannya.

Temuan tersebut sesuai dengan Quinn (2003) yang menempatkan strategi sebagai pola yang menyatukan tujuan, kebijakan, dan tindakan utama organisasi. Pada konteks Kelurahan Rawang, kekuatan strategi tidak hanya terletak pada keberadaan program, tetapi pada kemampuan pemerintah menghubungkan kegiatan yang berbeda menuju tujuan pengurangan risiko banjir. Koordinasi menjadi bagian paling menonjol karena kecamatan tidak memiliki seluruh kewenangan teknis dan membutuhkan hubungan kerja dengan kelurahan, BPBD, perangkat daerah, RT/RW, dan masyarakat.

Keterpaduan kegiatan juga menunjukkan bahwa mitigasi tidak cukup dilakukan melalui satu jenis tindakan. Pembersihan drainase menangani kondisi fisik saluran, sosialisasi mendorong pemahaman masyarakat, pemantauan membantu mengenali titik rawan, dan koordinasi membuka jalur tindak lanjut terhadap masalah yang berada di luar kewenangan kecamatan. Temuan ini sejalan dengan Munjiah dkk. (2025) dan Karniati (2024) yang menekankan perlunya rangkaian kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, evaluasi, dan dukungan antarpihak dalam mitigasi bencana.

Meskipun strategi telah berjalan, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi kondisi lapangan. Partisipasi masyarakat belum merata, beberapa saluran kembali tersumbat, keterbatasan sarana dan anggaran membatasi penanganan fisik, serta karakter geografis Rawang tetap menimbulkan kerentanan ketika curah hujan meningkat. Oleh karena itu, keterpaduan strategi perlu dipertahankan melalui kegiatan yang lebih rutin, penguatan komunikasi, dan tindak lanjut yang konsisten agar program tidak hanya aktif ketika musim hujan atau setelah banjir terjadi.

Pelaksanaan strategi juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Upaya pembersihan saluran dan pemeliharaan lingkungan akan sulit bertahan apabila kebiasaan membuang sampah ke drainase masih ditemukan atau keikutsertaan warga dalam gotong royong belum konsisten. Sebaliknya, masyarakat yang aktif menjaga lingkungan dan menyampaikan informasi mengenai genangan atau saluran tersumbat dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi lapangan lebih cepat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi mitigasi

membutuhkan hubungan yang terus terjaga antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan risiko tidak berhenti pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi menjadi kegiatan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Mitigasi Bencana Banjir

Hambatan strategi terutama terlihat pada sistem pengendalian yang belum sepenuhnya terstruktur, deteksi dini yang masih terbatas, evaluasi yang belum berlangsung rutin, dan masalah lingkungan yang terus berulang. Pemerintah telah melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat, tetapi intensitas pemantauan belum sama pada setiap waktu dan titik rawan. Kondisi ini membuat pengendalian masih dipengaruhi musim, ketersediaan personel, serta kecepatan informasi dari masyarakat.

Keterbatasan deteksi dini menunjukkan bahwa hubungan dengan masyarakat memiliki dua sisi. Laporan warga membantu pemerintah mengetahui kondisi yang tidak dapat dipantau aparatur setiap saat, tetapi ketergantungan pada laporan juga dapat memperlambat penanganan apabila informasi baru disampaikan setelah masalah membesar. Karena itu, kemampuan mengenali gejala awal perlu didukung oleh pemantauan yang lebih teratur dan saluran komunikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat.

Evaluasi sebenarnya telah dilakukan setelah kegiatan atau kejadian banjir, namun belum menjadi proses yang memiliki jadwal tetap dan dokumentasi yang konsisten. Kondisi tersebut membuat hasil evaluasi belum selalu membentuk siklus perbaikan yang dapat ditelusuri dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Dalam kerangka strategi Quinn, pengendalian dan evaluasi diperlukan agar tindakan yang dilaksanakan tetap terhubung dengan tujuan dan dapat disesuaikan ketika ditemukan hambatan baru.

Masalah yang berulang tidak dapat dipahami hanya sebagai kelemahan aparatur. Penyumbatan drainase berkaitan dengan sedimentasi dan perilaku membuang sampah, partisipasi masyarakat berbeda antarwilayah, kondisi geografis tetap menciptakan kerentanan, sedangkan perbaikan infrastruktur dipengaruhi kewenangan, anggaran, dan sumber daya. Dengan demikian, penguatan strategi memerlukan kombinasi pengendalian yang lebih terstruktur, evaluasi berkala, koordinasi lintas instansi, dukungan infrastruktur, dan pendidikan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan banjir membutuhkan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat bergantung pada tindakan setelah masalah muncul. Pemerintah perlu memperoleh informasi lapangan lebih awal, sedangkan masyarakat perlu berperan dalam menjaga kondisi saluran dan menyampaikan laporan ketika menemukan potensi gangguan. Pada saat yang sama, persoalan yang membutuhkan perbaikan fisik perlu diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan agar tindak lanjut tidak berhenti pada tingkat kecamatan atau kelurahan. Dengan pola tersebut, pengendalian, pelaporan, koordinasi, dan evaluasi dapat saling mendukung sehingga hambatan yang sama tidak terus muncul pada pelaksanaan mitigasi berikutnya.

KESIMPULAN

Strategi Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Rawang telah dilaksanakan melalui keselarasan tujuan, kebijakan, dan program, didukung pembagian tugas serta koordinasi antara kecamatan, kelurahan, instansi teknis, RT/RW, dan masyarakat. Pelaksanaan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi, gotong royong, pembersihan dan pemantauan drainase, pemantauan lokasi rawan, serta koordinasi

dalam penanganan permasalahan di lapangan. Namun, pelaksanaan strategi masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu partisipasi masyarakat yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, sistem pengendalian yang belum sepenuhnya terstruktur, kemampuan deteksi dini yang terbatas, serta evaluasi yang belum dilakukan secara rutin. Persoalan drainase dan sampah juga masih muncul berulang dan dipengaruhi oleh kondisi geografis Kelurahan Rawang. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi banjir tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kesinambungan koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan mitigasi perlu diperkuat melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih teratur, dokumentasi kegiatan yang jelas, peningkatan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan teknis, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini terbatas pada tujuh informan dan satu wilayah penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji wilayah rawan banjir lain atau membandingkan strategi mitigasi antarwilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengurangan risiko banjir.

REFERENSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Coppola, D. P. (2011). Introduction to international disaster management. Butterworth-Heinemann.

David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. Prentice Hall.

Karniati, N. (2024). Strategi pemerintah dalam mitigasi banjir di Kecamatan Dayeuhkolot. Jurnal Administrasi Publik.

Munjiah, N. M. K., dkk. (2025). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengurangi dampak kerusakan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Jurnal Kebijakan Publik.

Ndraha, T. (2003). Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.

Quinn, J. B. (2003). Strategic management: Concepts and cases. McGraw-Hill.

Rasyid, M. R. (2000). Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Yarsif Watampone.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Siagian, S. P. (2012). Manajemen strategik. Bumi Aksara.

Soemarto, C. D. (2009). Hidrologi teknik. Erlangga.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA